

S
352.1207
Rad
1
2007

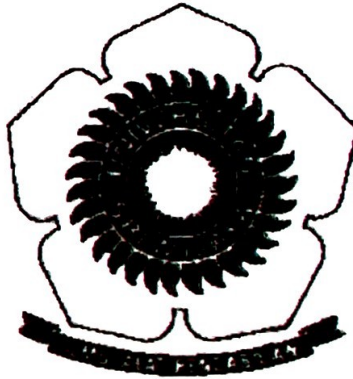
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**



SKRIPSI

**PENGARUH FASILITAS PUBLIK (PASAR, SEKOLAH DAN KESEHATAN)
TERHADAP PENGELUARAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA
PALEMBANG**

R. 15432
15794



**Disusun Oleh:
FREDRIK RADIAN
01033120019**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR
SARJANA EKONOMI**

2007

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**NAMA : FREDRIK RADIAN
NIM : 01033120019
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN
MATA KULIAH : KEUANGAN DAERAH
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH FASILITAS PUBLIK (PASAR, SEKOLAH
DAN KESEHATAN) TERHADAP PENGELUARAN
PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA
PALEMBANG**

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

Tanggal: 01 Februari 2007

KETUA PANITIA :



Dr. H. Didik Susetyo, M.Si

NIP. 131673869

Tanggal: 01 Februari 2007

ANGGOTA :



Drs. H. M. Hibzon, MB

NIP. 131673861

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

**PENGARUH FASILITAS PUBLIK (PASAR, SEKOLAH DAN KESEHATAN)
TERHADAP PENGELUARAN PEMBANGUNAN KOTA PALEMBANG**

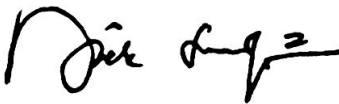
**Telah dipertahankan di depan panitia ujian komphrensif.
Pada tanggal 13 Februari 2007
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.**

Panitia Ujian Komphrensif.

Ketua:

Anggota:

Anggota:



Dr. Didik Susetyo, M.Si
NIP. 131673869

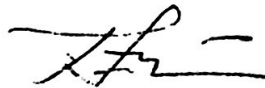


Drs. Hibzon MB
NIP. 131673861



Dra. Eka Rostartina
NIP. 131271080

**Mengetahui:
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan**



Dr. Taufik Marwa, M.Si
NIP.132050493

Kupersembahkan karya ini untuk:

- ❖ **Kedua Orangtuaku**
- ❖ **Saudara-Saudaraku**
- ❖ **Para Pendidikku**
- ❖ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi pada waktu dan rencana yang telah ditetapkan. Shalawat dan salam tak lupa penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Skripsi ini diberi judul “Pengaruh Fasilitas Publik terhadap Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Kota Palembang”

Adapun penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana ekonomi pada jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pengaruh fasilitas publik yang terdapat di Kota Palembang terhadap pengeluaran pembangunan Kota Palembang periode 1995-2005.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan dikarenakan oleh keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, maka saran dan kritik yang bersifat membangun ini sangat diharapkan, supaya pada penulisan selanjutnya dapat lebih baik lagi dan bermanfaat.

Palembang, Januari 2007

Penulis

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, yang berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Syamsurijal AK, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si., sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak bantuan serta bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
4. Dra. Sa'adah Yuliana, Msi., sebagai pembimbing akademik.
5. Drs. Zulkarnain Ishak, yang telah memberi banyak bantuan.
6. Kedua Orang tuaku, Papa dan Mama yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, semangat dan dukungan moral. Bowik selalu usahakan yang terbaik untuk kalian walau mungkin belum bisa yang paling terbaik. Doa Papa dan Mama adalah anugerah yang terbaik.
7. Kakak-kakak dan adik-adikku, Emil (Aming), Romi (Gelek), Shunita (Wiwik), dan Velda.
8. Keluarga Besar Mulk Ray dan Keluarga Besar H. Abdul Mukti
9. Tante Leni, yang sudah bantu Mama.....thanks yo!!
10. Bu Lili yang sudah banyak kasih pengalaman untuk survey lapangan.... semoga bermanfaat.
11. Sohikku Yoga, Game & Uka, "friendship forever" sampe akhir hayat kalau bisa.
12. K' Norman thanks atas buku-bukunya and Mbak V thanks atas dukungan semangatnya, akhriyo sarjana jugo!!!
13. Temen-temenku Yoseph, Olan & Derman. Bener-benerlah oi kuliah tu....
14. Anak-anak Kost Graha tahun 2003 : Eka, Lita, Lisa, Prety, Fery, Leo, Eko, bujang dan yang laen....
15. Temen-temen EP seperjuangan (angkatan 2003) : Alam n Hary, coi kalau ado loker & lokak ajak-ajak oi....., Asep, Fajar, Sigit, Aljabar, Edward, Rizqi, Rudi, Imam, Winaldo, Aprian.....sory coi aku duluan..... terus Apis, Andi, Adit, Dian, Didi,

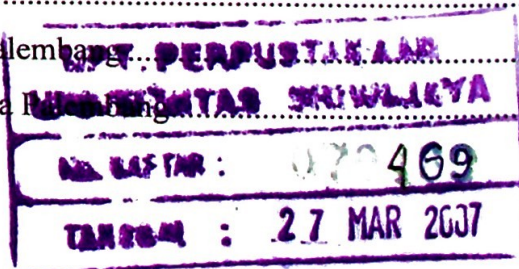
Adjie, Joule, Kalel, Yadi, Dendi dan yang laen.....pantang nyerah kawan tetap berjuang sampai jadi sarjana!!!

16. Rombongan cewek EP '03 : Reni Septiani, Vica, Uci....tahnks coi dah nolongi selamo skripsi....Pipit thanks atas kritikannyo...Ruth, Juwai, Lia, Ria, Faith, Sisti, Bunga, dan yang laen...seneng biso kenal kamu-kamu yang dak ado abisnyo!!!!
17. EP 2004 : Baasir, Tobok, Trie (K-link member), Cahiril, Yogi,Vina, Nova, Citra, dll
18. EP 2005: Dirta, Azka, Osa, Icha, Yuyun, dll
19. Untuk para ilmuan dan pemikir yang telah menciptakan tekhnologi, Bill Gates yang mengembangkan teknologi Komputer dengan menciptakan program termmodern yang memberikan banyak kemudahan, Alpaha Edison, Einstein, dan ilmuan lainnya.
20. Karyawan BPS Sumsel bagian perpustakaan data, trim's atas kesabarannya dan pengertiannya untuk kasih data yang diperlukan.
21. Semua yang sudah berjasa dalam hidup aku, semua yang kenal aku, KK tingkat dan adik – adik tingkat.

Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atau terlewatkan, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan, sumbangan saran dan masukan yang berarti bagi penyusunan'skripsi ini.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar.....	iv
Abstrak	v
Bab I : Pendahuluan	1
I.1. latar belakang	1
I.2. Perumusan Masalah	8
I.3. Tujuan	8
I.4. Manfaat.....	8
Bab II. Tinjauan Pustaka	10
II.1 Kerangka Teori	10
II.1.1. Peranan Pemerintah dalam Perekonomian.....	10
II.1.2. Teori barang Publik.....	11
II.1.3. Teori Makro	16
II.1.4. Pembangunan Ekonomi Lokal	19
II.2. Penelitian Terdahulu	21
II.3. Kerangka Pemikiran.....	22
II.4. Hipotesis	23
Bab III. Metodologi Penelitian	24
III.1. Ruang Lingkup Pembahasan	24
III.2. Data dan Sumber data.....	24
III.3. Teknik Analisis.....	24
III.4. Batasan variabel.....	28
Bab IV. Gambaran Umum	29
IV.1. Wilayah Administrasi Kota Palembang.....	29
IV.2. Perkembangan Penduduk Kota Palembang.....	30



IV.3. Produk Domestik Bruto Kota Palembang	31
IV.4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	34
IV.5. Sumber Keuangan Daerah.....	34
IV.6. Anggaran Belanja Pembangunan	36
IV.7. Sarana/ fasilitas Publik Kota Palembang.....	38
IV.7.1. Jumlah sekolah di Kota Palembang	38
IV.7.2. Jumlah Rumah Sakit dan Pelayanan Kesehatan	40
IV.7.3. Jumlah Pasar di Kota Palembang.....	43
Bab V. Pembahasan	45
V.1. Analisis Pengaruh Fasilitas Publik Kota Palembang terhadap pengeluaran Pembangunan Kota Palembang	45
V.2. Uji Asumsi klasik	46
V.3. Pengujian statistik	49
V.4. Interpretasi	56
Bab VI. Penutup	58
VI.1. Kesimpulan.....	58
VI.2. Saran	59
Daftar Pustaka	vi
Lampiran	vii

Daftar Tabel

Tabel I.1. Jumlah Sekolah, Rumah Sakit & Pasar di Kota Palembang 1995-2005	3
Tabel IV.1. Jumlah Penduduk di Kota Palembang 1995-2005	31
Tabel IV.2. Produk Domestik Bruto Kota Palembang 1995-2005	32
Tabel IV.3. PAD Kota Palembang 1999-2005.....	35
Tabel IV.4. Relaisasi Pengeluaran Pembangunan Kota Palembang 1995-2005	37
Tabel IV.5. Jumlah Sekolah di Kota Palembang	39
Tabel IV.6. Jumlah Rumah Sakit Kota Palembang.....	41
Tabel IV.7. Jumlah Pelayanan Kesehatan Lainnya di Kota Palembang	42
Tabel IV.8. Jumlah Pasar dan Petak/kios di Kota Palembang	43

Daftar Gambar

Gambar 2.2. Kurva Alokasi Sumber Optimum	
Barang Permerintah dan swasta	13
Gambar 2.3. Kurva Penyediaan barang Publik	
Berdasarkan Toeoi Samuelson	15
Gambar 2.4. Kurva Pendapatan Nasional berdasarkan pendekatan penawaran- permintaan agregat	17

Abstract

The purpose of this research is to know the influence of public facility (Numbers of school, hospital and health service and market compartment) to Palembang city development expenditure. The data used for this research is secondary data and to investigate the influence used OLS method program.

The finding of this research shows the influence of public facility (Numbers of school, hospital and health service and market compartment) to Palembang city development expenditure not significant. Number of market compartment and hospital show the positive correlation, but number of school show the negative correlation to development expenditure. It cause in this research only used the number of public facilities build growth to show the influence, and it also cause the changes of economic condition.

Key word: Development expenditure, public good

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh fasilitas publik (jumlah gedung sekolah, Rumah sakit dan pelayanan kesehatan serta jumlah petak pasar) terhadap pengeluaran pembangunan Kota Palembang. Data yang digunakan adalah data sekunder dan untuk mengetahui pengaruhnya menggunakan bantuan program SPSS.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan pengaruh fasilitas publik (jumlah sekolah, rumah sakit dan petak pasar) terhadap pengeluaran pembangunan Kota Palembang adalah tidak signifikan. Jumlah pasar dan rumah sakit menunjukkan hubungan positif sedangkan jumlah sekolah menunjukkan hubungan yang negatif terhadap pengeluaran pembangunan. Ini dikarenakan dalam penelitian hanya melihat dari perkembangan jumlah bangunan fasilitas publik untuk mengetahui pengaruhnya, dan juga dikarenakan adanya perubahan dari kondisi perekonomian.

Kata kunci : Pengeluaran pembangunan, barang publik.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh setiap negara bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat negara tersebut. Oleh karena itu pembangunan tidak hanya dilakukan pada satu bidang saja, tapi juga di bidang-bidang lain-lain seperti bidang pendidikan, kesehatan, keamanan dan yang terpenting dalam bidang ekonomi.

Riyadi dan Bratakusumah (2004 : 5) menyatakan bahwa pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernisasi. Oleh karena itu peranan pemerintah dalam pembangunan adalah penting, salah satunya dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Indonesia merupakan salah satu negara yang tujuan utama penyelenggaraan pemerintahannya adalah menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Akan tetapi cakupan wilayah yang luas dengan bentuk kepulauan, jumlah penduduk yang banyak, dan beragam budaya merupakan suatu kendala untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat.

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam upaya mewujudkan pelayanan yang optimal tersebut yaitu dengan kebijakan otonomi daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki peran yang lebih luas dalam menjalankan roda pemerintahan di

daerah. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah memiliki hak, wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan undang-undang.

Hal ini dituangkan dalam Undang-undang otonomi daerah No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan mengenai penyelenggaraan urusan pemerintah merupakan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota atau antar pemerintah daerah yang saling terkait, dan sinergis sebagai suatu sistem pemerintahan.

Berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintah sebagai pemberi pelayanan pada masyarakat, menurut Nurcholis (2005 : 179) ada tiga fungsi utama pemerintah baik pusat maupun daerah yaitu

1. Memberikan pelayanan/ service, baik layanan perorangan maupun layanan publik.
2. Membangun fasilitas publik untuk sarana pertumbuhan perekonomian daerah.
3. Memberikan perlindungan pada masyarakat.

Salah satu bentuk pelayanan yang penting diperhatikan oleh pemerintah untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat secara umum adalah pelayanan pada sektor publik. Hal ini dikarenakan kegiatan perekonomian ataupun aktivitas lainnya sangat berkaitan dengan perkembangan dari daerah tersebut. Perkembangan yang dimaksud adalah pembangunan berbagai fasilitas/infrastruktur untuk mempermudah dan memperlancar aktivitas masyarakat. Dari sejumlah fasilitas yang perlu dibangun,

beberapa fasilitas yang penting dan menjadi sorotan adalah sarana pendidikan seperti gedung sekolah, Rumah Sakit dan juga Pasar.

Tabel 1.1.
Jumlah Sekolah, Rumah Sakit dan Pasar di Kota Palembang
1995-2005

Tahun	Sekolah		Rumah Sakit		Petak Pasar
	negeri	swasta	negeri	swasta	
1995	710	542	7	5	4763
1996	710	545	8	5	4763
1997	965	545	9	6	4772
1998	719	574	9	6	4840
1999	718	558	9	6	7073
2000	717	550	4	10	4583
2001	718	606	8	9	7365
2002	645	583	3	11	9341
2003	645	576	14	4	11055
2004	416	572	14	7	8024
2005	499	650	8	13	7979

Sumber : Kota Palembang dalam angka, BPS Sumatera Selatan berbagai edisi

Dari Tabel 1.1. dapat dilihat jumlah sarana publik untuk sekolah, rumah sakit dan pasar yang tersedia di kota Palembang dari tahun 1995-2005. Pembangunan suatu daerah akan sangat membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka diperlukan sarana pendidikan yaitu sekolah sebagai tempat untuk dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian pasar berperan penting bagi aktivitas perekonomian, sebab pasar merupakan tempat berlangsungnya aktivitas perdagangan untuk mendapatkan barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Untuk dapat terus melakukan aktivitasnya mencapai kesejahteraan hidup, maka setiap orang perlu menjaga kesehatannya sehingga pelayanan akan kesehatan sangatlah diperlukan.

Pembangunan fasilitas/infrastruktur dapat dilakukan oleh pihak swasta dan pemerintah. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pihak swasta tentunya berorientasi pada keuntungan, sehingga penggunaan terhadap barang yang disediakan oleh pihak swasta tersebut memiliki batas-batas, terutama batasan bagi pihak-pihak yang boleh menggunakan fasilitas tersebut. Berbeda dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada barang publik dan dapat digunakan oleh masyarakat.

Contohnya jembatan, jika suatu jembatan dibuat oleh suatu perusahaan demi kelancaran distribusi barangnya, maka perusahaan tersebut dapat saja membatasi penggunaan jembatan tersebut. Masyarakat ataupun perusahaan lain tidak dapat dengan bebas menggunakan jembatan tersebut tanpa izin atau kompensasi dengan perusahaan yang membangunnya. Akan tetapi jika jembatan tersebut dibangun oleh pemerintah yang memang dipergunakan untuk keperluan publik, maka setiap orang dan setiap perusahaan dapat mempergunakannya dengan bebas.

Menurut Nurcholis (2005 : 178) pelayanan publik oleh pemerintah daerah harus berpijak pada nilai-nilai yang dipegang oleh rakyat atau penduduk yang tinggal di wilayahnya beserta harapan-harapan dan kepentingan-kepentingannya, sehingga pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah memberikan kepuasan kepada penduduk daerahnya.

Untuk melaksanakan fungsi pelayanan tersebut, pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit. Seperti yang dikemukakan Rasyid dalam Muslim (2003 : 6), untuk melaksanakan pembangunan khususnya pembangunan daerah, diperlukan dana untuk

membayai pembangunan dalam jumlah yang besar dan perlu disadari bahwa kegiatan pembangunan semakin meningkat setiap tahunnya.

Di Indonesia pengaturan dana yang diperlukan oleh pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan di daerahnya dibuat dalam bentuk APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Penganggaran adalah suatu proses menyusun rencana keuangan yaitu pendapatan dan pembiayaan, kemudian mengalokasikannya ke masing-masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai, kemudian dikelompokkan ke dalam program berdasarkan tugas dan tanggung jawab dari satuan kerja seperti dinas, departemen, dan lembaga teknis. Komposisi APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan (Nurcholis, 2005 : 105).

Sumber Keuangan daerah menurut UU No.33 tahun 2004, mengenai perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah berasal dari :

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas:

Pajak daerah, Retribusi, keuntungan Perusahaan Daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

b) Dana Perimbangan yang terdiri atas :

Bagian daerah dari PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan dana penerimaan sumber daya alam, DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus).

c) Lain-lain Pendapatan yang sah

Pengeluaran Pemerintah menurut Suparmoko (2000 : 44 – 45) dapat dinilai dari berbagai segi sehingga dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a) Pengeluaran itu merupakan suatu investasi yang menambahkan kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa-masa yang akan datang
- b) Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat
- c) Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang
- d) Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas.

Dari penilaian ini dapat dibedakan macam-macam pengeluaran seperti :

- a) Pengeluaran yang *Self-Liquidating* sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa-jasa/ barang-barang yang bersangkutan
- b) Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomis bagi masyarakat, yang dengan naiknya tingkatan penghasilan dan sasaran Pajak yang lain akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah.
- c) Pengeluaran yang tidak *Self-liquidating* maupun yang tidak reproduktif, yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat misalnya untuk bidang rekreasi, obyek-obyek turisme dan sebagiannya. Dalam hal ini dapat juga mengakibatkan naiknya penghasilan nasional dalam arti jasa-jasa tadi.

- d) Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan misalnya untuk pembiayaan perang meskipun pada saat pengeluaran terjadi penghasilan perorangan yang menerimanya akan naik
- e) Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang.

Kemudian menurut Shah dalam Sugita (2005 : 10) pengeluaran pemerintah daerah antara lain dapat diukur berdasarkan kebutuhan fiskal (*fiscal need*) suatu daerah. Kebutuhan fiskal adalah jumlah kebutuhan pelayanan publik standar yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan standar tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Variable yang digunakan untuk menghitung kebutuhan fiskal antara lain pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan keamanan, transportasi kesejahteraan sosial, jumlah penduduk, luas wilayah kepadatan penduduk serta pelayanan publik.

Selain untuk kesejahteraan masyarakat, pengeluaran pemerintah khususnya pemerintah daerah juga dimaksudkan untuk menjaga pembangunan dan hasil-hasilnya agar dapat dinikmati oleh daerah penghasilnya dan juga daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Optimalisasi pendayagunaan kekayaan daerah harus didukung oleh kecakapan, komitmen pemerintah daerah serta sumber daya manusia yang kondusif dan kompetitif.

Kota Palembang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, maka ketersediaan akan barang/infrastruktur publik yang dapat memperlancar pelayanan pemerintah terhadap masyarakat sudah seharusnya diperhatikan, sehingga

diharapkan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dapat mengalami percepatan.

Untuk penyediaan barang/infrastruktur sangat tergantung pada berapa besar dana yang akan dianggarkan dalam belanja daerah yang tentu besar kecilnya disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan. Dengan demikian manfaatnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat sebagai pengguna dari fasilitas publik yang disediakan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis pengaruh fasilitas publik terhadap pengeluaran pembangunan di Kota Palembang.

I.2. Rumusan masalah

Dari uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan diteliti adalah "Pengaruh Fasilitas Publik Terhadap Pengeluaran Pembangunan Pemerintah di Kota Palembang"

I.3. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Fasilitas publik terhadap Pengeluaran Pembangunan Pemerintah di kota Palembang.

I.4. Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Akademi

Bagi akademisi penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dalam pengkajian mengenai ekonomi keuangan daerah, khususnya tentang pengeluaran pemerintah dan barang publik.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan penetapan kebijakan keuangan daerah, terutama yang berkaitan dengan anggaran pengeluaran pemerintah dan penyediaan barang publik.